

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anisitus Amanat, Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penerapannya dalam Akta Notaris, (Jakarta: Rajawali Press), 1996.

Hilman Hadikusuma, 2005, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: PT. Alumni.

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, dikutip dari Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2009.

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2. Jakarta Djembatan, 2007.

J. Satrio, Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.

Muryanto, Perkembangan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, 2008.

Selly Masdalia Pratiwi, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Akhir Masa Jabatannya, Tesis Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014.

Sjaifurrachman, "Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta" Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal. 71
Sri Redjeki Hartono, Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang, 1985.

Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayumedia, Malang, 2007.

Jurnal Nasional

Jusup, Kenny (2021) Analisis yuridis pendirian dan perubahan perseroan terbatas yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Master thesis, Universitas Pelita Harapan.

Nicky Yitro Mario Raming, 2013. "Syarat-syarat Berdirinya Perseroan Terbatas di Indonesia". Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013. ISSN: 2337-4942

Purba, Meyranda Lista Br (2022) Analisis hukum perseroan perorangan sesuai undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja tanpa akta notaris. Master thesis, Universitas Pelita Harapan.

Shinta Pangesti, 2021 "PENGUATAN REGULASI PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM MENDUKUNG

PEMULIHAN EKONOMI MASA PANDEMI COVID-19” DOI:
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.650>

Website/Internet

Irna Nurhayati. “Ulasan Tentang Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas” diakses dari <http://mhugm.wikidot.com/artikel:002#:~:tex> diakses pada 25 Oktober 2022

Kanwil Sulsel, 16 Agustus 2022 “Perseroan Perorangan” diakses dari <https://sulsel.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/layanan-administrasi-hukum-umum/perseroan-perorangan>

Tata Cara Terbaru Dalam Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (hukumperseroanterbatas.com)

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H, “4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi”, Juli 2022 diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141> pada 3 Desember 2022

Syarat Sahnya Perjanjian yang Harus Dipenuhi Ketika Membuat Perjanjian Bisnis diakses dari <https://libera.id/blogs/tidak-hanya-4-ini-syarat-sah-perjanjian-yang-lengkap/> pada 3 Desember 2022

Nadhia Amania S, “3 Organ Penting Perseroan Terbatas”, Smart Legal, Maret 2017, diakses dari <https://elson.co.id/2017/03/3-organ-penting-perseroan-terbatas/> pada 28 November 2022

Legalitas.org, 6 Oktober 2022 “Perbedaan PT Perorangan dengan PT Biasa” diakses dari <https://legalitas.org/tulisan/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja#:~:text=PT%20Perorangan%20adalah%20Badan%20Hukum,unsur%20usaha%20mikro%20dan%20kecil.> Pada 12 November 2022

Legalitas.org, 6 Oktober 2021 “Cara Mendirikan PT Perorangan Sesuai UU Cipta Kerja” <https://legalitas.org/tulisan/inilah-cara-mendirikan-pt-perorangan-sesuai-uu-cipta-kerja> Diakses pada 12 November 2022

Putri Ayu Trisnawati, S.H “Perubahan Anggaran Dasar Dalam Perseroan Terbatas”, 2020. Diakses dari <https://pdb-lawfirm.id/perubahan-anggaran-dasar-dalam-perseroan-terbatas/> pada 3 Desember 2022

AHU Online: AHU ONLINE sistem Pelayanan Publik secara Online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia., Panduan Perseroan Perorangan,

diakses dari
https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=panduan_perseroan_perorangan
Diakses pada 3 Desember 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang **Hukum Perdata**

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang **Perseroan Terbatas**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas